

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Literatur

Pada bagian kajian pustaka, memuat hasil dari penelitian yang terdahulu dan konsep-konsep teori yang tentu berhubungan dengan fokus dari isu dan fenomena yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu implementasi kebijakan “*Zero Problems with Neighbors*” Turki dalam konflik Armenia-Azerbaijan. Dalam menjalankan kebijakan luar negeri tersebut, Turki mempunyai tujuan untuk dapat mencapai tujuan *national interest*nya. Karena Turki berkeinginan menjadi aktor baru dalam dunia internasional, ia mulai gigih menancapkan hegemoninya di kawasan regional dan bermaksud ikut campur dalam beberapa konflik negara lain dengan kata lain Turki mengintervensi. Tujuan dari literatur review adalah untuk mengumpulkan data-data yang ada terkait dengan isu yang dibahas dalam penelitian ini yakni mengenai kebijakan luar negeri yang di buat oleh Turki pada masa kepemimpinan Recep Tayyip Erdogan yaitu *Zero Problems With Neighbors*, yang mana Turki mengimplementasikan kebijakan luar negerinya pada konflik Nagorno-Karabakh yang melibatkan kedua negara yaitu Armenia dan Azerbaijan. Dimana dalam kebijakan luar negeri yang diciptakan oleh Turki ini memiliki, tujuan dan berfokus pada menjaga hubungan baik dengan negara tetangga nya .

Penulis membagi penelitian menjadi beberapa pembahasan. Literatur Review menjadi bagian dari tulisan ilmiah yang menunjukkan pemahaman tentang literatur akademis tentang topik tertentu yang ditempatkan dalam sebuah konteks. Tujuannya untuk membantu menjelaskan tentang variabel bebas, variabel terikat

serta hubungan keterkaitan antara kedua yang mencakup teori dan bukti yang ada. Literatur review membantu memudahkan penulisan dalam penulisan skripsi untuk meneliti. Selain itu, berfungsi untuk menghindari tindakan plagiarisme. Terdapat beberapa artikel, jurnal, dan bahan literatur ilmiah lain yang dijadikan referensi oleh penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, diantaranya:

Review 1 : Jurnal yang berjudul **“The Shift In Turkey’s Foreign Policy”** yang di tulis oleh Sofia Maria Setanakis dan Katrin Sus. Dalam jurnal tersebut, menjelaskan tentang pergeseran kebijakan luar negeri Turki hal ini terjadi pada masa pemerintahan Erdogan yang sudah hampir 20 tahun sebagai presiden Turki. Dijelaskan bahwa kebijakan yang di cetuskan oleh menteri luar negerinya yaitu Profesor Ahmet Davutoglo mempunyai tujuan yaitu meningkatkan hubungan Turki dengan negara-negara tetangganya. Pergeseran kebijakan luar negeri Turki serta peningkatan kekuatan di bidang militer merupakan suatu hal yang berdampak sangat baik bagi Turki itu sendiri, karena hal tersebut Turki bisa terlibat dalam beberapa isu internasional di sekitarnya seperti sengketa gas dengan Yunani, krisis negara Libya, (suss, 2021). Kemudian isu lainnya dan yang menjadi pembahasan pada penelitian ini adalah konflik Nagorno-Karabakh yang melibatkan Armenia dan Azerbaijan.

Dijelaskan dalam jurnal tersebut tentang hubungan Turki dengan NATO dan AS. Perubahan kebijakan luar negeri Turki yang lebih independen dan konfrontatif mengakibatkan sikapnya yang semakin berani dan tegas juga menentang beberapa kesepakatan seperti Turki membeli sistem pertahanan udara kepada Rusia yaitu S-400. Namun, karena hal seperti itu justru kemungkinan memberikan risiko cukup besar karena bisa jadi Rusia memanfaatkan kesempatan

itu untuk mengakses informasi pertahanan udara NATO. Karena hal tersebut Amerika Serikat memberikan sikap tegas dengan mengeluarkan Turki dari program jet tempur F-35. Bahkan suasana semakin panas dan tegang ketika AS menjatuhkan sanksi lain yaitu melarang semua izin dan otoritas ekspor AS kepada Direktorat Industri Pertahanan Turki, pembekuan aset dan pembatasan visa terhadap pejabat tinggi Turki (suss, 2021). Presiden Joe Biden yang masa tersebut memimpin Amerika Serikat mengambil langkah lain agar suasana tidak semakin panas dan tegang meskipun sebenarnya Joe Biden sering keberatan tentang kebijakan baru Turki. Namun, hal tersebut tidak dapat menghalangi sikap Amerika Serikat untuk mencari kesempatan emas agar Turki dan Amerika Serikat tetap menjalin kerjasama yang menguntungkan apalagi jika mengenai melawan Rusia. Hingga Joe Biden mengambil sikap menghindari konfrontasi dan lebih memikirkan untuk menghargai nilai geostrategis Turki. Dan upaya lain yang dilakukan Turki adalah memulihkan hubungan diplomatiknya dengan sekutu NATO, salah satunya adalah Biden dan Turki, mereka sekutu.

Dalam isu internasional lain nya adalah sengketa gas di Mediterania Timur yang melibatkan negara Yunani dan Turki, negara yang sejak dulu selalu tegang dan terlibat dalam beberapa krisis salah satunya adalah mengenai cadangan minyak dan gas alam serta hak maritim di kawasan Mediterania. Suasana tersebut semakin memuncak ketika Turki melakukan survei di wilayah yang mana wilayah tersebut diklaim oleh Yunani sebagai bagian dari landasan kontinennya. Bahkan suasana semakin diperparah ketika Turki tidak dilibatkan dalam forum EMGD (*EastMed Gas forum*) yang mana forum tersebut adalah forum dalam rangka menciptakan pasar regional. Namun keadaan di Mediterania tidak selalu tegang, seiring berjalan

nya waktu keadaan semakin membaik ketika semua pihak yang terlibat menyatakan kesiapan mereka untuk melakukan pembicaraan di bawah naungan NATO. Namun keadaan berbalik lagi, pada musim gugur tahun 2020 Turki berulah lagi dengan mengumumkan tentang kapal survei *Oruc Reis* akan terus beroperasi di dekat Pulau Kastellorizo, Yunani yang letaknya di 2 kilometer dari daratan Turki. Krisis di Mediterania akan terus terjadi mengingat karena berbagai alasan.

Dalam jurnal ini juga membahas hubungan Turki dan Libya yang terlihat baik baik dan bekerjasama guna mencapai tujuannya masing masing seperti dikatakan bahwa Erdogan menandatangani perjanjian maritim yang perjanjian tersebut menyatakan tentang koridor angkatan laut antara Libya timur laut dan Turki barat daya. Bahkan Turki menjanjikan kepada Libya akan membekali GNA dengan peralatan perang dan pelatihan militer. Awalnya kesepakatan tersebut ditolak oleh Libya tahun 2010 namun Turki mencoba lagi pada tahun 2019 Libya menyetujui tentang imbalan tersebut. Terlihat dari sikapnya Turki yang mengirim pasukan ketika Libya berkonflik perebutan Tripoli. Alasan Turki mengambil langkah tersebut adalah geostrategis dan ekonomis.

Pembahasan terakhir dalam jurnal ini adalah keterlibatan Turki dalam konflik Nagorno-Karabakh antara dua negara yaitu Armenia-Azerbaijan. Dalam konflik ini, Turki masuk sebagai aktor yang menjadi pembela atau memberikan dukungan penuh bagi Azerbaijan karena beberapa faktor seperti persamaan dalam budaya, bahasa dan agama. Karena kesamaan tersebut Turki mengambil langkah untuk menjadi sekutu atau aliansi Azerbaijan dengan memberikan bantuan peralatan perang, juga penjualan persenjataan Turki ke Azerbaijan yang memberikan untung bagi Turki (suss, 2021)

Review 2 : Jurnal yang ditulis oleh Abitasya Kurnia Jati, Ervina Ashyaningtyas, Hamas Nurhan, dan Hawa Aunal dengan judul “**Analisis keterlibatan Turki dalam konflik Nagorno-Karabakh : Studi kasus September war 2020**” dalam jurnal ini menjelaskan tentang sikap Turki pada konflik Nagorno-Karabakh yang baru baru ini tahun 2020 kembali meletus dengan skala besar pada bulan September selama 44 Hari. Konflik yang berakar pada abad ke- 19 hingga sekarang masih belum terselesaikan. Turki hadir dalam konflik tersebut adalah bukan sebagai mediator atau penengah guna mencari solusi bersama dan jalan keluar. Namun, dengan kenyataan yang ada berbanding terbalik, Turki hadir mengumumkan dirinya bahwasannya ia merupakan aliansi atau sekutu Azerbaijan. Sedangkan pihak luar lainnya yang hadir dalam konflik ini adalah Rusia. Sesaat setelah bentrok terjadi pihak Azerbaijan mengkritik keras mengenai penerbangan transportasi militer Rusia ke Armenia. Selama perang itu terjadi, banyak sekali korban yang berjatuh dalam laporannya sebanyak 6000 orang. Dalam periode ini dinamakan dengan “*September war*”, disini Azerbaijan unggul dalam peralatan perang yang digunakan nya salah satunya adalah penggunaan pesawat tanpa awak dan drone untuk mengidentifikasi posisi musuh. Setelah perang 44 hari usai, kedua belah pihak memutuskan untuk gencatan senjata pada 9 November 2020 dalam perjanjian tersebut berisikan 7 aspek yang harus di taati oleh kedua belah pihak. Di antaranya adalah pengembelian wilayah sekitar Nagorno-Karabakh di bawah kendali Azerbaijan. (Abitasya Kurnia Jati, 3 Januari 2022).

Review Jurnal ke tiga : yang berjudul “**Relevansi Rusia dan Turki pada Konflik Armenia-Azerbaijan di Wilayah Nagorno-Karabakh**” yang di tulis oleh Tio Ari Pratama, Michael Ahmad Zulha, dan Gili Argenti. Dalam jurnal ini

membahas bagaimana kedua negara tersebut terlibat dalam konflik Nagorno-Karabakh. Dijelaskan bahwa beberapa kali gencatan senjata 1994 namun hal tersebut tidak berpengaruh banyak hingga saat ini konflik tersebut masih meletus dan memakan korban jiwa banyak. Armenia dan Azerbaijan keduanya merupakan negara dari pecahan Uni Soviet dan konflik Nagorno-Karabakh awal terjadi setelah Uni Soviet bubar yaitu pada tahun 1980-an dan 1990-an.

Wilayah yang terletak di Kaukasus selatan ini menjadi rebutan dan saling mengklaim, menurut keputusan lembaga-lembaga resmi Uni Soviet, Nagorno-Karabakh secara *de jure* termasuk ke dalam wilayah Azerbaijan tetapi penduduk Nagorno-Karabakh mayoritas adalah etnis armenia. Dalam jurnal tersebut disebutkan bahwa perang antara Armenia-Azerbaijan merupakan perang etnis dan termasuk ke dalam golongan perang modern yang disebut Perang hibrida (*Hybrid Warfare*) maksudnya adalah perang yang tidak beraturan dan ancaman *Cyber warfare* seperti menggunakan serang nuklir, senjata biologi, kimia, perang informasi dan lain sebagainya. (Tio Ari Pratama, Maret 2023)

Sebagai upaya untuk menyelesaikan konflik tersebut pihak internasional memilih *Organization For Security and Cooperation In Europe* (OSCE) yang sejak tahun 1994 melakukan pendekatan untuk menjadi mediator yang diketuai oleh beberapa negara yaitu Amerika Serikat, Perancis, dan Federasi Rusia mereka dikenal dengan sebutan *CO-Chair*. Namun upaya tersebut belum berhasil sepenuhnya menyelesaikan konflik Nagorno-Karabakh. Dalam konflik tersebut Turki dan Rusia masuk dan menjadi aktor luar yang terlibat. Turki yang merupakan sahabat baik dari Azerbaijan mendukung sepenuhnya terhadap negara tersebut dalam melawan musuh. Hubungan bilateral kedua negara tersebut tidak dapat di

bandingkan dengan hubungan antar negara lainnya. Selain merupakan Turki sahabat baik secara politik, ternyata kedua negara tersebut memiliki persamaan di berbagai bidang yaitu bahasa, agama, dan budaya. Hal tersebut yang membuat Turki selalu mendukung Azerbaijan hingga saat ini. Hal lain nya pada pandangan Ankara sendiri Konflik tersebut merupakan pertunjukan yang semakin besar di Wilayah Kaukasus selatan yang penting secara strategis (Tio Ari Pratama, Maret 2023)

Review jurnal 4 : yang berjudul **“Kebijakan Luar Negeri Turki : Kesepakatan Turki kepada Rusia dalam mendirikan Pusat Gabungan Turki-Rusia pasca Konflik Nagorno-Karabakh”** yang ditulis oleh Falentinoros Yubilio Wiku, Ika Riswanti Putranti, dan Marten Hanura. Dalam jurnalnya dikatakan bahwa Turki masuk kedalam konflik ini sebagai aliansi dari Azerbaijan, sedang Rusia sebagai mediator. Namun, karena kepentingan nasionalnya dan kebijakan luar negerinya Turki juga terlibat dalam proses perdamaian dalam konflik tersebut seperti pada hari ke-9 bulan November 2020 kedua belah pihak yang berkonflik menandatangani persetujuan gencatan senjata. Setelah kesepakatan tersebut ditandatangani maka langkah yang dilakukan oleh Turki dan Rusia sebagai mediator dalam konflik Nagorno-Karabakh mendirikan Pusat Gabungan Turki-Rusia pada 10 November 2020 kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (Mou) dan Pusat Gabungan tersebut diresmikan pada hari ke-30 bulan Januari 2021 (Falentinoris Yubilio Wiku, 2022) oleh kedua Menteri Pertahanan dari masing-masing negara. Dan yang menjadi point utama tentang mendirikan Pusat Gabungan Turki-Rusia adalah sebagai bentuk dan upaya

juga perdana bagi Turki sendiri terlibat dalam proses perdamaian konflik Nagorno-Karabakh.

Untuk menganalisis tentang kesepakatan Turki-Rusia mendirikan Pusat Gabungan Turki-Rusia Pasca Konflik Nagorno-Karabakh penulis Jurnal menggunakan Teori Kebijakan Luar negeri Walter Calsnaes yang dijelaskan pada beberapa dimensi yaitu pertama, dimensi Struktural (*Objective conditions* dan *Institutional Setting*) karena ketergantungan Turki kepada Rusia pada beberapa bidang seperti ekonomi dan militer. Pada bidang ekonomi, Turki dan Rusia sedang terlibat dalam proyek pembangunan Nuklir Akkuyu pada 12 Mei 2010 dan proyek tersebut memberikan keuntungan besar bagi Turki karena keseluruhan biaya tentang proyek tersebut dibebankan kepada Rusia dan limbah yang dihasilkan dari reaktor nuklir tersebut diolah oleh Rusia.

Pada bidang militer, Turki sedang terlibat dalam kontrak pengiriman senjata S-400. Kedua, dimensi disposisional (*perceptions dan values*) yaitu karena doktrin kebijakan luar negeri Turki “ *peace at home peace in world* ” Turki ingin ikut serta dalam menciptakan perdamaian dunia dan Turki ingin merebut posisi *Co-Chairs OSCE Minsk Group* yang gagal dalam penyelesaian konflik Nagorno-Karabakh oleh karenanya, Turki ingin dipandang sebagai negara yang bisa dan juga layak sebagai mediator pada konflik tersebut. Kemudian yang tiga, dimensi Internasional (*Choice dan preference*) faktor ekonomi lainnya yaitu Turki mendapatkan keuntungan dari kerjasama yang dibentuk pada penyaluran gas alam dari Azerbaijan melalui Trans Anatolia Natural Gas Pipeline (TANAP) (Falentinoris Yubilio Wiku, 2022).

Dari keempat Jurnal dan penelitian terdahulu yang sudah direview, semua jurnal tersebut telah menjelaskan sebagian besar bagaimana Turki terlibat dalam konflik Nagorno-Karabakh yang melibatkan dua aktor negara yaitu Armenia dan Azerbaijan. Turki melakukan hal tersebut tentu tidak lepas dari kepentingan nasional yang ingin dituju dan mencari keuntungan pada konflik tersebut. Kemudian dijelaskan juga bagaimana Turki dapat mengambil posisi dan masuk bukan hanya sebagai aliansi dari Azerbaijan tetapi guna menjaga hubungan baik dengan negara tetangga seperti Rusia yang terlibat sebagai mediator, maka Turki juga mengambil langkah untuk ikut terlibat dalam proses perdamaian konflik Nagorno-Karabakh yang hingga saat ini konflik masih berlanjut.

Kebijakan luar negeri Turki “*Zero Problems with Neighbors*” mendorong Turki agar terus menjalin hubungan baik khususnya negara-negara yang dekat dengan nya. Namun, beberapa kondisi dan situasi membuat Turki mengambil langkah lain dan terkadang berbanding terbalik dengan prinsip kebijakan luar negerinya tetapi meski begitu Turki tidak lupa dengan mementingkan kepentingan nasionalnya.

Tabel 2.1 Tinjauan Literatur

| Judul | Masalah | Teori | Kesimpulan |
|---|---|----------------------------|--|
| 1. Analisis dukungan Turki terhadap Azerbaijan dalam konflik Nagorno-Karabakh tahun 2020. | Tujuan lain Turki terlibat dalam konflik Azerbaijan dan Armenia adalah untuk menyeimbangkan pengaruh Rusia di Kaukasus. | Teori kepentingan nasional | Salahsatu bantuan yang diberikan Turki terhadap Azerbaijan pada konflik <i>september war</i> adalah bantuan alutsista seperti UAV Bayraktar- |

| | | | |
|---|---|--|---|
| (Sumber : journal.peradaban .ac.id) | | | TB2, peluncuran roket TRG-300. Dalam jurnal ini ada beberapa point yang menjadi vital interest Turki yaitu kebutuhan Energi Turki, politik regional. |
| 2. Turkey's Engagement in the conflict of Nagorno-Karabakh. (Sumber: jurnal.upnyk.ac.) | Keterlibatan Turki dalam konflik Azerbaijan dan Armenia bukan sebagai mediator, tetapi sebagai aliansi dari Azerbaijan. Dalam hal tersebut banyak pengamat yang mengatakan bahwa sikap Turki justru akan memperpanjang konflik. Terlebih dalam jurnal ini terdapat data pemasokan senjata, alutsista, dan alat tempur lain nya ke Azerbaijan juga pengiriman tentara dan latihan Bersama. | Teori kepentingan nasional dan kebijakan luarnegeri. | Turki memiliki kepentingan nasional nya dalm konflik tersbut adalah salah satunya untuk mengejar tujuan nya melemahkan <i>status quo</i> kawasan tersebut dan turki berniat ingin berdampingan dengan Rusia sebagai mediator dalam konflik tersebut (tidak melibatkan aktor barat). Selain dari hal tersebut tidak terlepas dari pengaruh isu agama, Azerbaijan yang mayoritas beragama islam dan Erdogen yang merupakan pemimpin Turki sangat condong ke Islam. |
| 3. Drone Bayraktar TB2 sebagai Instrumen Diplomasi pertahanan | Salah satu pesawat tanpa awak milik Turki yang digunakan oleh Azerbaijan untuk menggempur Armenia dan berhasil. Hal tersebut | Teori Diplomasi pertahanan perspektif non-koersif | Salah satu hasil dari keberhasilan Turki dalam membangun infrastruktur militer adalah |

| | | | |
|---|--|---|--|
| <p>internasional Turki.</p> <p>(Sumber : ojs.unikom.ac.id)</p> | <p>menjadi perhatian baru bagi negara-negara lain dan menjadi salah satu ancaman dalam bidang militer. Turki yang semakin ingin memunculkan dirinya di internasional.</p> | | <p>pesawat tanpa awak yang dipakai oleh Azerbaijan. Pesawat tanpa awak ini dapat membawa empat rudal jenis <i>smart micro munition</i> (MAM-L) karena drone ini pada perang september war 2020 Azerbaijan menang menggempur pertahanan Armenia. Fakta ini menjadi salah satu bukti bahwa Turki sangat membantu dan mendukung Azerbaijan dalam konflik dengan Armenia dalam bidang militer.</p> |
| <p>4. The Shift In Turkey's Foreign Policy.</p> <p>(Sumber : aies.at)</p> | <p>Pergeseran atau perubahan kebijakan luar negeri Turki pada masa pemerintahan Recep Tayyib Erdogan yang mana kebijakan luar negeri lebih independen dan konfrontatif</p> | <p>Kebijakan luar negeri dan <i>national interest</i></p> | <p>Pergeseran kebijakan luar negeri Turki pada masa pemerintahan Recep Tayyib Erdogan yang lebih Independen dan konfrontatif dapat di lihat dari citra hubungan yang dibuat oleh Turki dengan beberapa negara dan isu internasional seperti Krisis Yunani, Sengketa gas di Mediterania, Hubungan antara</p> |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | NATO dan AS juga keterlibatan Turki dalam konflik Nagorno-Karabakh yang melibatkan Armenia-Azerbaijan |
|--|--|--|---|

2.2. Kerangka Teoritis

2.2.1. Teori Realisme

Teori Realisme adalah teori klasik dan merupakan teori yang sangat Familiar dalam hubungan Internasional. Berbagai macam anggapan tentang realisme yaitu dapat dikatakan sebagai paradigma/perspektif/pendekatan, teori, filsafat politik atau bahkan filsafat ilmu. Jika kita mengatakan bahwa hanya dengan keseimbangan kekuasaanlah maka stabilitas internasional akan terjamin maka kita menganggap bahwa realisme sebagai teori (Rosyidin, juli-desember 2022). Prinsipnya adalah bahwa semua negara memiliki kemampuan sebagai ancaman bagi negara lain nya. Oleh karena nya, selama dunia ini masih ada maka konflik akan terus terjadi. Pada dasarnya Realisme lahir dari manusia yang memiliki watak *egoistik dan agresif*. Dalam teori ini juga dijelaskan bahwa aktor utamanya adalah negara. Yang mana negara dapat dikatakan sebagai suatu aktor kesatuan dan teori ini mengasumsikan bahwa pembuat keputusan tergantung pada pencapaian nasional yang akan didapatkan oleh negara tersebut. Ada beberapa point mengapa teori Realisme adalah salah satu perspektif utama dalam hubungan internasional yaitu sebagai berikut :

- a) Yang menjadi aktor utama dalam teori ini adalah *state*.
- b) Ketika suatu negara menjalin hubungan dengan negara lain dikancah internasional, yang paling utamakan adalah kepentingan nasionalnya.
- c) Adanya perbedaan antara politik luarnegeri dan politik dalam negeri karna terdapatnya pola-pola atau struktur analisis yang tidak sama diantara luar negeri dan politik dalam negerinya.
- d) Tujuan suatu negara menjalin hubungan dengan negara lain adalah untuk berusaha mendapatkan kejayaan atau kekuasaan.
- e) Adanya pandangan pesimistis atas sifat manusia.

Menurut Hans J. Morgenthau pada dasarnya teori realisme di tandai oleh pemikiran teori kepada sesuatu “Konsep Pluralistic tentang hakikat manusia. Manusia sejati adalah gabungan dari berbagai jenis manusia yaitu manusia ekonomi, manusia politik dan manusia religius” (Morgenthau, Desember 1952) karena konsep dasar tersebut yang menggambar makna dasar manusia diproyeksikan secara makro dalam realisme politik internasional. Dikatakan dalam bukunya bahwa Realisme politik internasional pad hakekatnya merupakan :

“...struggle for power as like all politic, is a struggle for power. Whatever the ultimate aims of politics power is always the immediate air man’s control over the minds and actions of other man. Political power is the mutual relations of control among the holders of public authority and between the latter and the people at large”

Teori realisme politik muncul sebagai reaksi terhadap pendekatan Idealism. Realisme memiliki beberapa asumsi yaitu :

- 1) yang pertama, pesimis terhadap karakter manusia.
- 2) Yang kedua, keyakinan bahwa hubungan internasional merupakan konflik-konflik dan konflik-konflik diselesaikan melalui perang.
- 3) Yang ketiga, tingginya nilai-nilai keamanan nasional dan bertahannya negara.
- 4) Dan yang ke empat, skeptis akan ada kemajuan dalam politik internasional dibandingkan dengan kehidupan politik dalam negeri (Soresen, 2013).

Menurut Hans Morgenthau, yang merupakan tokoh realisme ia mengatakan bahwa wanita dan pria adalah binatang politik. Kedua makhluk tersebut dilahirkan untuk mengejar kekuasaan dan menikmati kekuasaan. Juga teori ini bersifat rasional yang mana selalu memperhitungkan *cost and benefit* dari setiap tindakannya demi kepentingan keamanan nasional. Hans Morgenthau juga mendefinisikan politik internasional sebagai perebutan kekuasaan yang penting untuk keberlangsungan hidup negara, keamanan nasional dan dalam beberapa kasus bahkan hegemoni dunia (Uzer, Vol. 32 No 2 June 2012). Untuk dapat kita tahu bahwa suatu negara menggunakan paham realisme, kita dapat melihatnya dari pelaksanaan politik luar negeri yang bersifat unilateralis (*unilateralism*), Nasionalis (*nationalisme*), dengan strategi penangkalan, *deterrence*, pertimbangan kekuatan (*balance of power*), Aliansi-Aliansi pertahanan (*defence alliances*)

Merujuk pada teori realisme, maka perilaku setiap negara dikatakan akan selalu mengejar kekuasaan dan kekuatan dengan menjalankan segala misi dan visi negara seperti Turki, dalam membuat kebijakan luar negerinya tidak melupakan *national interest* yang harus di capainya. Dalam teori ini negara adalah aktor tunggal, karena negara adalah aktor yang berupaya memaksimalkan kepentingan

dirinya atau tujuan nasional dalam politik luar negeri. Meski demikian, aspirasi setiap negara untuk memperoleh power, merupakan unsur mencolok dalam politik internasional (Sitepu, 2006). Mengacu pada penelitian ini, Turki adalah aktor negara yang muncul dalam konflik Armenia-Azerbaijan yang mana hal tersebut tidak lepas untuk mencapai kepentingan dan kekuasaan juga kekuatan bagi Turki itu sendiri. Keseluruhan kisah Nagorno-Karabakh menunjukkan validasi paradigma utama realime, yaitu negara memerlukan swadaya untuk melindungi mereka dan tidak adanya pemerintahan dunia (prinsip anarki) berarti tidak ada mekanisme internasional untuk melindungi negara kedaulatan. Kecuali ada kesediaan untuk membangun aliansi dengan negara-negara besar untuk melindungi negara-negara yang lebih lemah. Faktanya bahwa perebutan kekuasaan adalah motivasi utama negara dan mereka mencari kekuasaan demi kelangsungan hidup mereka serta melindungi diri dari negara-negara tetangga yang agresif dan negara-negara yang lain.

Kegunaan konstruktivisme dalam kasus konflik Armenia-Azerbaijan adalah menurut teori ini, kepentingan negara dan persepsi keamanan dikonstruksi secara sosial (didefinisikan dan diinterpretasikan) melalui variabel budaya seperti identitas dan nasionalisme. Identitas, didefinisikan sebagai “kesadaran diri, bahwa individu sebagai suatu kelompok memiliki kualitas yang berbeda sebagai suatu entitas yang membedakan mereka” dari kelompok nasional lainnya, merupakan faktor kunci dalam konstruktivisme dan nasionalisme. Peningkatan tersebut juga telah dibuktikan secara teoritis dan empiris dalam perasaan nasionalistik kemungkinan besar akan menghasilkan kekerasan. Hal inilah yang terjadi di Kaukasus tidak hanya antara Armenia dan Azerbaijan. Kepentingan negara,

menurut penafsiran ini, tidak muncul dengan sendirinya, melainkan perlu didefinisikan dan diberi makna sesuai dengan kecenderungan ideasional negara atau negara-negara yang bersangkutan.

Selain itu, peran norma dalam menentukan perilaku yang pantas bagi negara adalah faktor lain dalam menjelaskan perilaku kebijakan luar negeri. Akibatnya, Karabakh menjadi simbol nasional bagi orang-orang Armenia yang pembebasannya dari “orang Turki”, yang dipandang menindas orang-orang Armenia selama berabad-abad dan merupakan tugas patriotik nasional. Upaya seperti itu merupakan perilaku yang pantas bagi negara Armenia, yang muncul setelah kemerdekaan yang berumur pendek antara tahun 1918 dan 1920.

Oleh karena itu, identitas nasional Armenia di negara Armenia, menurut analisis mereka, memerlukan perlindungan terhadap sesama warga Armenia yang berjuang untuk kemerdekaan dan atau aneksasi ke Armenia. Dengan kata lain, pembentukan negara Armenia yang sangat nasionalistis dengan identitas Armenia sebagai pusatnya memaksa penyelamatan warga Armenia yang menduduki wilayah Karabakh. Singkatnya, variabel konstruktivis seperti identitas nasional dan negara menyebabkan perang dan faktor realis, yang paling utama adalah kekuatan, menentukan hasil dari perang sipil atau internasional. Legalitas tidak mempengaruhi perilaku orang Armenia dan Karabakh. Kelompok Minsk yang dibentuk oleh PBB atau OSCE tidak mampu menyelesaikan perselisihan tersebut

tidak ada keinginan dari negara-negara besar untuk memaksa Armenia atau melakukan intervensi langsung memperbaiki situasi. Akibatnya, teori mengenai rezim internasional atau organisasi internasional tidak terlalu relevan dalam kasus Nagorno-Karabakh.

2.2.2. Teori Kebijakan luar negeri

Menurut K.J Holsti yang merupakan salah satu yang mengemukakan teori tersebut , kebijakan luar negeri adalah suatu ide serta gagasan dalam membentuk suatu rumusan dengan tujuan untuk memecahkan adanya suatu permasalahan maupun bertujuan untuk melakukan perubahan-perubahan dalam suatu wilayah. Menurut Charless Herrmann kebijakan luar negeri merupakan konsep yang terabaikan yang maksudnya adalah konsep yang kurang didefinisikan, Menurut Charless Herrmann dapat ditekankan pada perilaku negara. Baginya kebijakan luarnegeri adalah tindakan yang bertujuan yang digambarkan sebagai hasil dari keputusan tingkat politik seseorang atau sekelompok individu yang dapat diamati dari suatu keputusan tingkat politik. Selain itu, tujuan dari kebijakan luar negeri adalah untuk menunjukkan eksistensi nya dalam sistem internasional. dengan dibentuknya suatu kebijakan luar negeri, setiap negara diharuskan memiliki persamaan juga memiliki pemahaman dalam melakukan kerjasama. hal tersebut dilakukan memiliki alasan tertentu yaitu untuk mencapai tujuan dan memenuhi kebutuhan dalam negerinya. kebijakan luar negeri dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu dengan berkonflik atau berperang, kerjasama dan perdamaian. Orientasi pembuatan kebijakan luar negeri dapat dilihat dari beberapa faktor seperti kondisi geografis atau faktor kekuatan negara lain nya.

Secara teoritis, ada beberapa elemen penting dalam menentukan *foreign policy* suatu negara yaitu sistem internasional, sistem politik domestik, dan aktor pengambil keputusan *foreign policy*. Ketiga Elemen tersebut merupakan masukan

yang menentukan *output* (kebijakan) dan *outcome* (implementasi) politik luar negeri. Menurut Daniel S. Papp. Dalam penyusunan kebijakan luar negeri Papp membagi tahapannya yaitu :

“Goal Setting, intelligence gathering, reporting, and interpreting option formulation, planning and programming, decision making policy articulation, policy implementation, policy monitoring, policy appraisal, policy modification, and memory storage and recall” (Papp, 1997)

ia juga mengatakan bahwa *decision making process* akan menjadi fleksibel penerapannya dalam merespon perubahan sistem internasional yang berkembang demikian cepat. Sebab kebijakan luar negeri adakalanya mesti diputuskan dalam waktu singkat untuk merespon peristiwa penting yang mendadak terjadi serta mempengaruhi hubungan negara.

Menurut Hudon, ia mengatakan ada beberapa penekanan perbedaan mendasar terkait keputusan dan tindakan kebijakan luar negeri yaitu diantaranya :

- a) Yang pertama adalah sebuah keputusan mungkin tidak pernah menghasilkan tindakan karena mungkin memang terdapat keputusan yang diambil untuk tidak melakukan tindakan atau keputusan dianggap tidak memadai bagi anggota kelompok pembuat kebijakan untuk bertindak.
- b) Yang kedua adalah penipuan, ketidaktuludan dan penyembunyian lainnya cukup umum terjadi dalam kebijakan luar negeri.
- c) Yang ketiga adalah terkait implementasi kebijakan luar negeri seringkali salah arah dengan keputusan yang diambil.

Definisi kebijakan luar negeri tidak diartikan bahwa sebuah kebijakan yang dibuat bersama-sama oleh aktor internasional antarnegara, melainkan

kebijakan yang dibuat di level domestik oleh negara itu sendiri terkait urusan luar negeri. Apabila kebijakan luar negeri dimaknai dengan konteks dibuat bersama antar aktor-aktor internasional, maka hal tersebut pada dasarnya merupakan implikasi dari kebijakan luar negeri suatu negara. Setiap kebijakan yang diambil oleh pembuat kebijakan berbanding lurus dengan konsekuensi terhadap negara-negara lain. Hal tersebut terkait bahwa kebijakan luar negeri tidak hanya berpusat pada kepentingan nasional saja, melainkan juga tentang pemimpin dan bagaimana proses pengambilan keputusan. Oleh karenanya, beberapa teori analisa kebijakan luar negeri dapat dijadikan landasan dalam mengidentifikasi bagaimana aktor domestik membuat kebijakan luar negeri, faktor-faktor yang berpengaruh, serta komponen-komponen yang terdapat didalamnya. Seperti halnya tentang Kebijakan luar negeri yang dibuat oleh Turki menggambarkan bagaimana Turki untuk mencapai tujuannya yaitu dengan bekerjasama dengan negara Azerbaijan dan berkonflik dengan Armenia. Hal tersebut merupakan hal yang wajar dilakukan oleh suatu negara dalam berinteraksi antar negara di dunia global tanpa mengedepankan hal apapun selain keuntungan dan kepentingan nasional negara itu sendiri.

2.2.3. Teori Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional diartikan sebagai suatu sumber atau gagasan dari kebijakan politik luar negeri suatu negara. National Interest adalah tujuan dan ambisi negara, baik ekonomi, militer, atau budaya. Menurut aliran arus utama dalam Studi Hubungan Internasional, konsep ini penting sebagai dasar bagi negara dalam melakukan hubungan internasional. Menurut Machiaveli mengenai kepentingan nasional banyak dirujuk dalam praktik maupun pengembangan

teoretis, sebagai pembenaran bagi perilaku internasional negara yang mengabaikan kepentingan utama pada masa purba sebelumnya, yaitu agama dan moralitas. Negara diturunkan dari tatanan ilahi dan tunduk pada kebutuhan khususnya sendiri, yaitu kepentingan nasional. Kepentingan nasional sangat erat kaitannya dengan power negara sebagai tujuan maupun instrumen, khususnya yang bersifat destruktif (hard power). Ketika kepentingan nasional bertujuan untuk mengejar power dan power dipergunakan sebagai instrumen untuk mencapai kepentingan nasional, maka konsekuensinya dalam sistem internasional yang dipersepsikan anarki kecuali kekuasaannya sendiri adalah kompetisi, kemunculan perimbangan kekuasaan, konflik dan perang.

Ada dua faktor menurut Morgenthau tentang gagasan kepentingan nasional yaitu : yang pertama adalah tuntutan untuk bersikap rasional berdasarkan kepada sifat kebutuhan yang kedua karena perubahan berdasarkan situasi (Morgenthau, Desember 1952) karena hal tersebut dunia yang terus berkonflik dan terus bersaing antara satu sama lain, negara-negara dengan pertahanannya memenuhi kebutuhan kepentingan dalam negerinya. kepentingan nasional dibedakan dalam dua jenis yaitu yang pertama adalah kepentingan yang vital maksudnya adalah kepentingan yang secara langsung menentukan hidup atau matinya suatu negara. dan yang kedua adalah kepentingan yang tidak vital maksudnya adalah kepentingan yang sebaliknya, tidak langsung memberikan pengaruh terhadap hidup atau matinya suatu negara. Teori ini juga merupakan konsepsi yang sangat umum tetapi memiliki unsur yang menjadi kebutuhan sangat penting bagi sebuah negara. Tujuan yang paling mendasar serta faktor paling menentukan yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik

luar negeri adalah kepentingan nasional, maksudnya adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan bangsa atau negara dengan hal sesuatu yang dicita-citakan (Sorensen., 2005)

Morgenthau mengatakan bahwa *national interest* dapat digambarkan kemampuan suatu negara untuk melindungi dalam beberapa bidang seperti wilayah atau teritorial, politik, dan budaya terhadap negara-negara lain. Hans J. Morgenthau mengartikan bahwa kepentingan nasional adalah point yang paling utama tentang politik luar negeri dan politik internasional yang realis. pemikirannya berlandaskan pada pernyataan yang menurutnya benar bahwa strategi diplomasi haruskan didasarkan atas *national interest*. ia mengatakan bahwa kepentingan nasional adalah untuk mengejar kekuasaan (Pham, 2015)

Dalam memutuskan kebijakan luarnegerinya, tentu Turki mempertimbangkan dalam segala aspek dan faktor-faktor agar kepentingan atau tujuan yang ia kejar tercapai. Seperti yang kita tahu bahwa Turki merupakan negara besar dan berpengaruh di kawasan Timur Tengah Oleh karena hal tersebut, kebijakan luar negeri yang harus ia cetuskan harus tepat sasaran agar kebijakan itu muncul menjadi pendorong Turki agar semakin meningkatkan eksistensinya di kawasan tersebut (Abisatya Kurnia Jati, 3 januari 2022)

2.2.4. Teori Implementasi Kebijakan luar negeri

Teori ini memiliki banyak model atau teori salah satunya adalah dikembangkan oleh Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier yang dinamakan dengan *A Frame Work For Implementation Analysis* dalam bahasa Indonesianya adalah kerangka Analisa Implementasi. Menurut Mereka, peran penting dari analisis

implementasi kebijakan negara adalah mengidentifikasi variable-variable nya yang diklarifikasikan menjadi 3 yaitu : Mudah tidaknya masalah yang akan digarap untuk kendalikan, kemampuan keputusan kebijakan untuk menstruktur secara tepat proses implementasinya, pengaruh langsung berbagai variable politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan tersebut. Implementasi kebijakan sebenarnya bukan hanya sekedar mengenai mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi, tetapi lebih dari hal tersebut, adalah mengenai masalah konflik dan keputusan dan siapa yang memperoleh sesuatu dari kebijakan tersebut (Abas, 2018).

Mengacu pada teori ini, Turki mencetuskan kebijakan luar negerinya *Zero Problems With Neighbors* memiliki tujuan untuk mencapai kepentingan nasional. Selain itu, Turki ingin menunjukkan diri di dunia internasional bahwa negara merupakan negara yang menjunjung tinggi perdamaian dengan langkahnya mengimplementasikan kebijakan yang ada yaitu menjaga hubungan baik dengan negara tetangga juga sekitarnya.

2.3 Asumsi Penelitian

Melihat dari latar belakang, identifikasi masalah, *literature review*, hingga teori-teori serta konsep yang digunakan, maka dengan melihat hal-hal tersebut penulis mengajukan asumsi penelitian sebagai dugaan sementara yang harus diuji terlebih dahulu kebenarannya. Oleh sebab itu, penulis merumuskan asumsi penelitian sebagai berikut:

“Peran Turki dalam konflik Armenia-Azerbaijan sebagai langkah Turki dalam mengimplementasikan kebijakan Zero Problems with Neighbors Dan Menstabilkan Keamanan Kawasan ”

2.4 Kerangka Analisis

